

ABSTRACT

This study analyzes efforts to reduce stunting in Jambi Province through a collaborative planning approach. Stunting is a condition of growth failure in children due to chronic malnutrition during the First 1,000 Days of Life, which seriously impacts cognitive development and the future productivity of human resources. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The results showed that collaborative planning has been implemented through cross-sector coordination involving various stakeholders, such as Bappeda, Health Office, BKKBN, TP PKK, private sector, and academics. The role of Bappeda as the primary coordinator and BKKBN as the secretariat of the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) proved crucial in harmonizing policies between agencies. However, there are still constraints such as budget limitations in some Regional Apparatus Organizations (OPDs) and reliance on village heads' preferences in mobilizing posyandu cadres, which could affect the quality of services at the family level.

Keywords: *Stunting, collaborative planning, Stakeholder Synergy, Jambi Province.*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penurunan angka *stunting* di Provinsi Jambi melalui pendekatan perencanaan kolaboratif. *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yang berdampak serius terhadap perkembangan kognitif dan produktivitas sumber daya manusia di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kolaboratif telah diimplementasikan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, BKKBN, TP PKK, sektor swasta, dan akademisi. Peran Bappeda sebagai koordinator utama serta BKKBN sebagai sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) terbukti krusial dalam menyelaraskan kebijakan antarinstansi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ketergantungan terhadap preferensi kepala desa dalam menggerakkan kader posyandu, yang berpotensi memengaruhi kualitas layanan di tingkat keluarga.

Kata Kunci: *Stunting*, perencanaan kolaboratif, Sinergi Pemangku Kepentingan, Provinsi Jambi.